

PENGUNAAN TANAH

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO.14, BD 2022/NO. 14 SETDA KOTA YOGYAKARTA : 8 HLM
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN IZIN
PENGUNAAN TANAH

- ABSTRAK
- Dalam rangka adanya perubahan izin penggunaan tanah dari pertanian dan non pertanian mampu mendukung upaya guna mendukung upaya ketersediaan lahan pertanian.

 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi; Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041

 - Dalam Peraturan Walikota ini secara garis besar mengatur tentang tata cara adanya perubahan izin penggunaan tanah dari pertanian dan non pertanian mampu mendukung guna ketersediaan lahan pertanian yang terdiri dari Ketentuan umum, Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Izin Peubahan Penggunaan Tanah, Masa Berlaku Izin, Bentuk Formulir, Pengawasan dan Pengendalian, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. Dengan berlakunya peraturan Walikota ini diharapkan agar Izin Perubahan penggunaan tanah dari pertanian dan non pertanian dilaksanakan secara efektif.

CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022.